



PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PONOROGO

Septa Purwaningrum, Arif Hartono, Ika Farida Ulfah
Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
*E-mail : septapurwa03@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas public oleh organisasi sector publik, terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas publik mencakup penyajian laporan keuangan dan laporan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Ponorogo baik secara parsial dan simultan. Data yang digunakan adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan alat uji analisis SPSS. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada SKPD Se Kab. Ponorogo, sampel dalam penelitian ini sebanyak 125 karyawan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan (X2) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Kata kunci : penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, akuntabilitas pengelolaan keuangan

PENDAHULUAN

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik, seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak - hak publik (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas terkait laporan keuangan salah satunya mencakup penyajian laporan keuangan. Pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan (Mulyana, 2006). Reformasi dan regulasi yang terkait dengan penyajian laporan keuangan daerah, ditandai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Penyajian laporan keuangan oleh pemerintah harus memenuhi unsur-unsur



karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan, melainkan juga laporan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut (Steccolini, 2002). Pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya (Permendagri No. 21 Tahun 2010).

Aksesibilitas dalam organisasi sektor publik dapat ditingkatkan dengan dibuatnya Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kemendagri dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk: (a) mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, (b) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kemendagri dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas. Aksesibilitas dalam laporan keuangan merupakan kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006).

Kemampuan untuk memberikan aksesibilitas dan tingkat pengungkapan laporan keuangan kepada *stakeholder* adalah kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas keuangan daerah (Somad, 2016). Menurut Aliyah dan Nahar (2012) agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD saja tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat

mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhayani (2010) yang memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (survey pada seluruh dinas pemerintahan kota Bandung). Hasil yang diperoleh penelitian ini adalah (1) Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (2) Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo. Ditemukannya kasus korupsi atau penggelapan uang pengadaan alat peraga tahun 2012 senilai Rp 6 miliar untuk 121 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan tahun 2013 senilai Rp 2,1 miliar untuk 43 Sekolah Dasar Negeri (SDN) se Kabupaten Ponorogo yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) (<http://surabaya.tribunnews.com> di akses pada 31 Mei 2018). Kasus korupsi tersebut, berdasarkan dari sisi akuntabilitas pengelolaan keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan masih terdapat kelemahan. Dilihat dari sisi penyajian laporan keuangan yang seharusnya digunakan untuk menjamin para pengguna dan pihak otoritas penguasa atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dilaksanakan karena adanya kasus korupsi ini masih terdapat kelemahan. Hal ini berarti masih terdapat kendala dalam menyajikan laporan keuangan dan aksesibilitasnya. Sehingga perlu dianalisis lebih jauh tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu variabel dan objek yang diteliti. Variabel yang berbeda dengan penelitian lainnya yaitu Penyajian Neraca Daerah yang digantikan dengan Penyajian Laporan Keuangan, dimana penelitian



terdahulu untuk mengetahui persepsi atau pendapat responden mengenai Neraca Daerah dan penelitian ini untuk mengetahui persepsi atau pendapat responden terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan perbedaan hasil beberapa penelitian dan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk menguji lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo”**

TINJAUAN PUSTAKA AKUNTANSI PENDIDIKAN

Kemampuan untuk memberikan aksesibilitas dan tingkat pengungkapan laporan keuangan kepada *stakeholder* adalah kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas keuangan daerah (Somad, 2016).

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN

Menurut Nordiawan (2008) akuntabilitas adalah mempertanggung-jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut Bastian (2010) akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggung-jawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban.

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah

berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut (Wahida, 2015)

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah kewajiban pemerintah kepada publik untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Menurut Nordiawan (2008), laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung-jawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2009).

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (*wide range users*) untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi

sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan (Bastian, 2010).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Penyajian laporan keuangan merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Dari pengetahuan diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan seluruh transaksi keuangan yang telah dilakukan suatu entitas baik sektor publik maupun swasta.

AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN

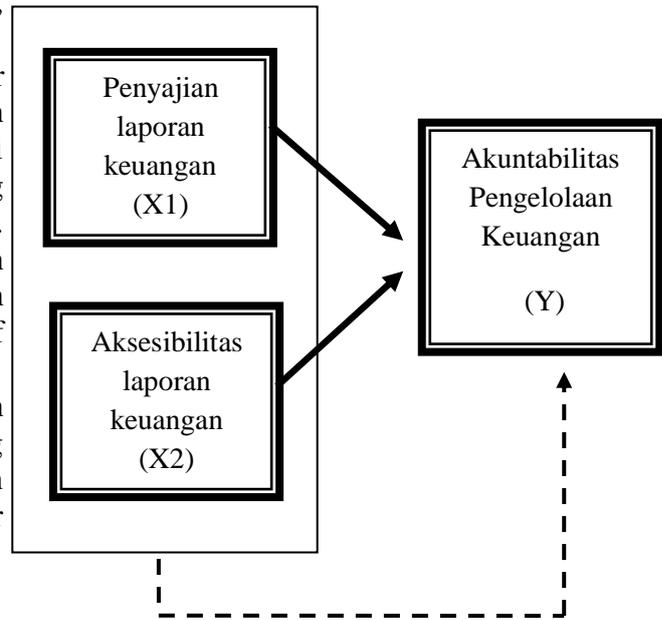
Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009).

Aksesibilitas dalam laporan keuangan merupakan kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006).

Pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya (Permendagri No. 21 Tahun 2010).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan pengertian aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan dalam mengakses dan memperoleh informasi laporan keuangan yang dibuat oleh unit pemerintah.

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

HIPOTESIS

1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Sande, 2013).

Nurhayani (2013) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian milik Sande (2013) menyatakan Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya suatu laporan keuangan akan berimplikasi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Faktor utama untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan adalah penyajian laporan keuangan yang relevan, andal, mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Berdasarkan atas dasar dukungan teori dan bukti empiris diatas, maka dapat dibangun hipotesis :

H₀₁ : Penyajian Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo

Ha₁ : Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo

2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.

Aksesibilitas dalam laporan keuangan merupakan kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Demokrasi yang terbuka dapat diakses melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi dan *website*, dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shande dan Bennet, 2004). Pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkan, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya (Permendagri No. 13 Tahun 2006).

Sande (2013) menyatakan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya aksesibilitas laporan keuangan akan berimplikasi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₀₂ : Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo

Ha₂ : Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo

3. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.

Menurut Mardiasmo (2009) laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Demokrasi yang terbuka dapat diakses melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi dan *website*, dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shande dan Bennet, 2004).

Sande (2013) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₀₃ : Penyajian Laporan



Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo

Ha₃ : Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo

UJI KUALITAS DATA UJI VALIDITAS

Uji validitas data digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur melalui kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Apabila valid pengujian penelitian menggunakan *correlated item – total correlation* dimana apabila r hitung $>$ r tabel dan menunjukkan nilai positif, maka indikator tersebut dikatakan valid.

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN (X1)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Penyajian Laporan Keuangan (variabel independen) merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN (X2)

Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi *stakeholder* untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi *stakeholder* (Wahida, 2015)

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN (Y)

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD (Sande, 2013).

METODE ANALISIS DATA PENGUKURAN DATA

Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner adalah skala likert. Skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial (Santoso, 2015).

UJI RELIABILITAS

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban terhadap pertanyaan adalah stabil atau konsisten (Ghozali, 2011). Variabel dikatakan reliabel jika Cronbach alpha (α) $>$ 0.60..

ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji prediksi terdapat lebih dari satu variabel tergantungan berdasarkan pada satu variabel bebas yang digunakan (Ghozali, 2011). Untuk menguji hipotesis pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ponorogo, bentuk persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

X₁ : Penyajian Laporan Keuangan

X₂ : Aksesibilitas Laporan Keuangan

a : Konstanta

b₁ : koefisien regresi dari X₁

b₂ : koefisien regresi dari X₂

e : kesalahan residual (error turn)

UJI T (PARSIAL)

Uji T digunakan untuk mengukur tingkat signifikan dari pengaruh variabel independen

secara parsial terhadap variabel dependen (Santoso, 2015). Uji T yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dengan kriteria sebagai berikut (Ghozali, 2011) jika t hitung $<$ t tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, jika t hitung \geq t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Batas nilai signifikan (α) sebesar 5% dan df (degree of freedom) = n-k dimana ini untuk mengetahui besarnya nilai t tabel sebagai batas daerah penerimaan atau penolakan hipotesis.

UJI F (SEREMPAK)

Uji F digunakan untuk mengukur tingkat signifikan pengaruh variabel independen secara serempak terhadap variabel dependen (Santoso, 2015). Uji F yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan cara dengan membandingkan F hitung dengan F tabel yang terdapat pada tabel ANNOVA (Ghozali, 2011), yaitu: jika F hitung $<$ F tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, jika F hitung \geq F tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa data yang digunakan membuktikan bahwa semua variabel bebas atau independen (X_1 dan X_2) berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel terikat.

KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)

Uji koefisien determinan digunakan untuk untuk menguji seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 adalah antara 0 dan 1 yang berarti kemampuan variabel independen dalam menggambarkan variabel dependen sangatlah terbatas (Ghozali, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

OBJEK PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah seluruh pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo berjumlah 4.790. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan didapatkan sampel sebanyak 153 responden.

STATISTIK DESKRIPTIF HASIL PENELITIAN

Variabel Penyajian Laporan Keuangan menunjukkan jumlah data yang digunakan dalam penelitian sebanyak 125 data dari responden. Rata-rata (*mean*) adalah 34.26 dengan standar deviasi sebesar 2.376. Nilai terendah (minimum) berkisar 29 dan nilai tertinggi (maximum) adalah 40.

Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan menunjukkan jumlah data yang digunakan dalam penelitian sebanyak 125 data dari responden. Rata-rata (*mean*) adalah 12.29 dengan standar deviasi sebesar 1.367. Nilai terendah (minimum) berkisar 9 dan nilai tertinggi (maximum) adalah 15.

Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan menunjukkan jumlah data yang digunakan dalam penelitian sebanyak 125 data dari responden. Rata-rata (*mean*) adalah 34.13 dengan standar deviasi sebesar 2.899. Nilai terendah (minimum) berkisar 28 dan nilai tertinggi (maximum) adalah 40.

UJI KUALITAS DATA

UJI VALIDITAS

Suatu alat ukur (butir pertanyaan) dikatakan valid jika tingkat signifikansi di bawah 0,05 (5%) atau jika nilai r hitung $>$ nilai r tabel. Dalam penelitian ini jumlah sampel adalah 125 responden, dengan demikian besarnya *degree of freedom* (df) = n-2 adalah 125-2 = 123, pada tingkat signifikansi 0,05 (5%) diperoleh nilai r tabel sebesar 0,1757. Maka dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dapat dipakai atau valid.

UJI RELIABILITAS

Variabel atau konstruk dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0,60. Semua item pertanyaan untuk mengukur variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0,60 maka semua item pertanyaan reliabel atau dapat dipercaya.

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Berdasarkan hasil output analisis regresi diatas dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 11.606 + 0.399X_1 + 0.722X_2 + e$$

PENGUJIAN HIPOTESIS

UJI T (PARSIAL)

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan antara penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan menunjukkan t hitung > dari t tabel yaitu 4,034 > 1,979 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Artinya **Ho1 ditolak dan Ha1 diterima**, artinya penyajian laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan.

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan menunjukkan t hitung > dari t tabel yaitu 4,195 > 1,979 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Artinya **Ho2 ditolak dan Ha2 diterima**, artinya aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan..

UJI F (SEREMPAK)

Berdasarkan hasil uji f yang telah dilakukan dapat diketahui nilai Fhitung > Ftabel yaitu 30.317 < 3,07 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05. sehingga **Ho3 ditolak dan Ha3 diterima**. Artinya penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

KOEFISIEN DETERMINASI (R²)

Nilai *R square* (R²) sebesar 0,332 atau 33,2% yang menunjukkan besarnya penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan menjelaskan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sedangkan sisanya sebesar 66,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Secara parsial penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Ponorogo. Dengan adanya penyajian laporan keuangan yang baik, yang memenuhi karakteristik laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di suatu daerah.

Semakin baik suatu penyajian laporan keuangan maka semakin baik pula tingkat per-tanggungjawaban pengelolaan keuangan dan pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas.

2. Secara parsial aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Ponorogo. semakin baik aksesibilitas laporan keuangan suatu lembaga pemerintahan maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangannya.

3. Secara simultan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Ponorogo. Semakin disajikan dengan utuh, jelas, tepat waktu dan kemudahan akses suatu laporan keuangan maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberikan hasil bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.
2. Hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.
3. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya adalah:

1. Penelitian ini menggunakan data yang berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada masing-masing responden. Sehingga ada kemungkinan responden memberikan persepsi yg berbeda atas apa yg menjadi pengetahuan dan pengalamannya.
2. Peneliti tidak mendampingi secara langsung pada saat pengisian kuesioner. Sehingga ketika ada responden yang kurang paham mengenai pernyataan yang diajukan, responden tidak bisa menanyakan secara langsung kepada peneliti dengan melakukan pengisian berdasarkan persepsinya sendiri-sendiri.
3. Nilai koefisien determinasi sebesar 33,2% yang kurang dari 50% dan tergolong rendah. Hal tersebut berarti akuntabilitas pengelolaan keuangan hanya mampu dipengaruhi oleh faktor penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan sebesar 33,2%, sedangkan sisanya 66,8% dipengaruhi oleh faktor lain.

Saran Penelitian

Berdasarkan hasil analisis pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan dalam penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar penelitian selanjutnya memperoleh hasil yang lebih baik diantaranya:

1. Bagi Objek Yang Diteliti

- a. Dalam hal penyajian laporan keuangan, SKPD di Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat terus meningkatkan penyajian laporan keuangan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
- b. Setiap SKPD diharapkan terus membuka akses untuk kemudahan dalam memperoleh informasi keuangan dan pada akhirnya akan mampu meminimalisir terjadinya praktek korupsi, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan akan terwujud.
- c. Pemerintah Kabupaten Ponorogo diharapkan terus meningkatkan

penyajian laporan keuangan dan juga mempublikasikannya kepada masyarakat luas agar menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang lebih baik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian misalnya dengan mengambil sampel wilayah se Karisidenan Madiun.
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan metode pengumpulan data yang lebih lengkap dan akurat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menambahkan metode pengambilan data dengan wawancara secara langsung atau dengan dokumentasi sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban sebenarnya dan tidak menimbulkan persepsi jawaban yang tidak konsisten serta menimbulkan perbedaan atas integritas yang dimaksud.
- c. Dapat menambahkan atau mengganti dengan variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan misalnya penyajian neraca daerah seperti penelitian oleh Aliyah dan Nahar tahun 2012 dan variabel transparansi yang diteliti oleh Apriliani dkk pada tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah dan Nahar. (2012). "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara." **Jurnal Akuntansi & Auditing**. Volume 8/No. 2/Mei 2012: 97-189. Hlm. 137-150
- Apriliani, dkk. (2015). "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan



- Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung)." **E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1** (Volume 3 No. 1 Tahun 2015). Hlm. 1-10
- Bastian, Indra. (2010). **Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga**. Jakarta. Erlangga.
- Bandariy, Himmah. (2011). "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah." **Skripsi**. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2011). **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- <http://infokorupsi.com> diakses pada 8 Desember 2017
- <http://korantransparansi.com> diakses pada 8 Desember 2017
- <http://surabaya.tribunnews.com> diakses pada 31 Mei 2018
- Mahsun, Mohamad. (2006). **Pengukuran Kinerja Sektor Publik**. Yogyakarta: BPF.
- Mardiasmo. (2009). **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta: ANDI.
- Mulyana, Budi. (2006). "Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah." **Jurnal Akuntansi Pemerintahan** Vol.2 No. 1. Mei 2006.
- Nurhayani, Hani. (2010). "Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survei Seluruh Dinas di Pemerintahan Kota Bandung)." **Jurnal Akuntansi Universitas Komputer Indonesia**. Hlm. 1-12.
- Nordiawan, Deddi. dkk. (2008). **Akuntansi Pemerintahan**. Jakarta : Salemba empat.
- Perda Kabupaten Ponorogo No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Permendagri No 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kemendagri dan pemerintah daerah
- Permendagri No 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No. 21 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Rasul, Syahrudin. (2002). **Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran**. Jakarta: Detail Rekod.
- Rohman, Abdul. (2009). "Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah". **Jurnal Akuntansi dan Bisnis** Vol 9 No 1 Hal 9-14. Universitas Diponegoro Semarang.
- Rosjidi. (2001). **Akuntansi Sektor Publik Pemerintahan: Kerangka, Standar dan Metode**. Surabaya: Aksara Satu.
- Safitri, Ratna Amalia. (2009). "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan



- Daerah (Studi Empiris Di UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Kabupaten Semarang).” **Skripsi** Negara
Fakultas Ekonomi Universitas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Diponegoro Semarang. Daerah
- Sande, Peggy. (2013). “Pengaruh Penyajian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap UU No. 33 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat).” **Jurnal Akuntansi**. Fakultas Ekonomi Wahida, N. (2015). “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara.” **Skripsi**. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Santoso, Slamet. (2015). **Penelitian Kuantitatif Metode dan Pengolahan Data**. Ponorogo: Umpo Press.
- Shende, Suresh dan Tony Bennet. (2004). “Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration.” **UN DESA**. Hlm. 1-17
- Somad, Abdus. (2016). “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang).” **Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)**. ISSN: 2337-56xx. Volume:xx, Nomor: xx. Hlm. 1-20
- Steccolini, Ileana. (2002). “Local Government Annual Report: an Accountability Medium?. EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms.” **Dublin**. September 2002. Hlm. 1-30
- Subekti, Ika Arifanny dkk. (2015). “Pengaruh Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Studi Persepsi Pengguna Eksternal Laporan Keuangan Kota Banjarmasin).” **JSAI**: Vol. 2 No. 1 Juni 2015. Hlm. 72-84
- Sugiyono. (2017). **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**. Bandung: PT Alfabet
- Zama, Riyan Eriko. (2016). “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Zama, Riyan Eriko. (2016). “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Pringsewu.” **Skripsi**. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- www.ponorogo.go.id diakses pada 28 April 2018